



## PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Prgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat ;  
melawan

TERGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUASA KHUSUS DKKpara Advokat pada Kantor Hukum Draft Attorneys & Counsellors At Law, berkedudukan hukum di Jl. Kota Palu Sulawesi Tengah, sebagaimana surat kuasa Khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Nomor 04/SK/II/2017 tanggal 07 Februari 2017, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register Nomor 407/Pdt.G/2017/PA.Prgi. pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dahulu Kabupaten Donggala  
sekrang Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah  
sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor  
.../52/VIII/1998 tertanggal 31 Juli 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman milik bersama setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah kerumah orang tua Tergugat di Kota Palu sampai berpisah.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - ANAK KE I , umur 17 tahun.
  - ANAK KE II, umur 10 tahun.
  - ANAK KE III, umur 4 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2010 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Tergugat sering cemburu tanpa ada alasan yang jelas.
  2. Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pertengahan November 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

2 | Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Prgi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (TERGUGAT ) kepada Penggugat (PENGGUGAT ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dahulu Kabupaten Donggala sekrang Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;  
untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Mazidah, S.Ag., M.H (Hakim pada Pengadilan Agama Parigi), namun menurut laporan mediator tanggal 9 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai *Accessoir* dalam hal kesepakatan dalam pemeliharaan anak namun tidak berhasil dalam pokok perkara;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan setelah proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri dan Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya tertanggal 25 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Prgi tanggal 25 Januari 2017;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa pun dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

4 | Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi melalui seorang mediator dan menurut laporan mediator tertanggal 9 Februari 2017, mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan dalam hal pemeliharaan anak namun tidak berhasil dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun sebagaimana layaknya suami istri dan akan membina rumah mereka dengan lebih baik lagi dan Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya sebelum Tegugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Penggugat untuk mencabut perkaranya karena telah rukun kembali, maka sesuai Pasal 271 Rv Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

5 | Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Prgi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut, maka seluruh dalil yang dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan kesepakatan perdamaian dalam mediasi sebagaimana laporan mediasi tanggal 9 Februari 2017 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Prgi dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 951.000,- (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser,

6 | Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Prgi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI sebagai Ketua Majelis, Zuhairah Zunnurain, S.HI., dan Muhammad Husni, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Muhammad Husni, Lc

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00

7 | Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Prgi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	860.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h                      Rp. 951.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah)